

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan analisis bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pada masa pemerintahan Perdana Menteri Malcolm Turnbull isu migrasi ditingkatkan sebagai isu keamanan. Tindakan tersebut dilakukan berdasarkan konsep sekuritisasi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Konsep sekuritisasi melibatkan empat elemen dasar yaitu *securitization actor*, *referent object*, *functional actors* dan *audience*. Upaya sekuritisasi migrasi dilakukan oleh pemerintahan Perdana Menteri Malcolm Turnbull sebagai *securitization actor*. *Securitization actor* kemudian menggunakan *speech act* melalui berbagai media resmi pemerintah untuk mengartikulasikan isu migrasi sebagai ancaman.

Upaya *speech act* yang dilakukan oleh Perdana Menteri Malcolm Turnbull begitu mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan perbatasan dan pemenuhan kewajiban internasional, mengingat terdapat krisis pengungsi yang terjadi tepat sebelum masa pemerintahannya dimulai. *Speech act* tersebut mendapat respon dari mayoritas masyarakat sebagai *audience* sesuai dengan yang dimaksudkan oleh pemerintah, sehingga dapat dijadikan alasan untuk melakukan tindakan darurat yang diperlukan untuk mengatasi isu yang sudah dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional Australia sebagai *referent object*.

Respon masyarakat kemudian membentuk kebijakan publik terkait isu migrasi. Kebijakan tersebut meliputi kebijakan restriktif dari masa pemerintahan sebelumnya, yaitu *Operation Sovereign Border*. Kebijakan restriktif ini merupakan bentuk upaya untuk melakukan kontrol pada perbatasan maritim Australia, khususnya dari berbagai macam ancaman yang seringkali diindikasikan dengan para pencari suaka sebagai pihak luar. Ancaman-ancaman tersebut meliputi penyelundupan manusia yang berpotensi menimbulkan kejahatan-kejahatan lain seperti pemalsuan identitas, peredaran obat-obatan terlarang, pembunuhan, penganiayaan serta kerusuhan, dan ancaman terorisme. Selain untuk menangani ancaman keamanan, penerapan kebijakan restriktif juga merupakan

bentuk upaya untuk menangani beban sosial dan ekonomi yang ditimbulkan dari datangnya para pencari suaka.

Padahal, sebagai negara peserta Konvensi 1951, Australia memiliki tanggung jawab memperlakukan pencari suaka tanpa terkecuali dengan menghormati prinsip-prinsip *non-expulsion* (larangan pengusiran), *non-refoulement* (larangan pengembalian paksa ke negara asal), *rejection at the frontiers* (penolakan di perbatasan), dan non-ekstradisi pesuaka hingga status pengungsi ditentukan. Membingkai migrasi sebagai masalah keamanan dapat membenarkan tindakan hukum dan kebijakan luar biasa untuk mengelolanya. Keberhasilan penerapan kebijakan perlindungan perbatasan dalam menangani pencari suaka juga tidak dapat lepas dari dukungan publik terhadap pemerintah.

Meskipun aktor sekuritisasi memiliki posisi dan sudut pandanganya masing-masing dalam merespon isu migrasi, namun untuk memperoleh dukungan publik terhadap pemerintah, pemerintahan Perdana Menteri Malcolm Turnbull juga mempertimbangkan beberapa elemen pendukung yang memainkan peranan penting dalam dinamika sekuritisasi. Elemen tersebut adalah: pengaruh legitimasi *functional actors*, seperti oposisi politik; media dan peradilan; penggabungan konteks domestik dan internasional; dan sekuritisasi yang dilembagakan.

Pertimbangan tersebut mendorong beberapa perubahan kebijakan yang lebih mempertimbangkan aspek kemanusiaan dari para pencari suaka pada masa pemerintahan Perdana Menteri Malcolm Turnbull. Perubahan tersebut diantaranya: penutupan tujuh belas fasilitas detensi imigrasi darat yang kerap menuai kontroversi; perubahan model pemrosesan lepas pantai di Nauru menjadi model terbuka; perjanjian pemukiman kembali di negara ketiga dengan Amerika Serikat; penerapan hasil kesepakatan *United Nations Summit for Refugees and Migrants* diantaranya komitmen untuk memberikan tambahan kontribusi dana dan penerimaan pengungsi melalui program kemanusiaan; dan lahirnya *Bali Declaration*.

4.2 Saran

Penelitian ini hanya berfokus pada proses sekuritisasi migrasi pada masa pemerintahan Perdana Menteri Malcolm Turnbull dan tidak mengukur implementasi maupun efektivitas kebijakan migrasi yang dibuat oleh Pemerintah Australia pada masa pemerintahan Perdana Menteri Malcolm Turnbull. Dengan demikian, saran yang dapat diberikan dari penelitian ini secara akademis adalah diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengamatan terhadap implementasi maupun efektivitas kebijakan migrasi yang dibuat pada masa pemerintahan Perdana Menteri Malcolm Turnbull.

Terkait permasalahan migrasi sendiri, penulis memiliki saran untuk beberapa pihak, diantaranya:

1. Untuk Pemerintah Australia, khususnya Departemen Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan, harus berusaha lebih mengoptimalkan kerangka yang jelas untuk memastikan para pencari suaka diproses terlebih dahulu sebelum menghubungkan para pencari suaka tersebut dengan tindak-tindak kriminalitas. Hal ini dapat mencegah kebijakan Australia yang mengarah pada proses kriminalisasi yang tidak tepat sasaran.
2. Untuk Pemerintah Australia, khususnya Departemen Luar Negeri dan Perdagangan, harus berupaya meningkatkan diplomasi dengan negara-negara asal, transit, dan tujuan dari para pencari suaka untuk menanggulangi permasalahan migrasi tidak teratur secara maksimal dengan menggunakan prinsip *collective responsibility*.
3. Untuk masyarakat Australia, sebagai pihak yang menentukan keberhasilan sekuritisasi harus menyadari bahwa para pencari suaka tidak bisa dipandang hanya sebagai sebuah ancaman keamanan nasional yang dianggap berbahaya dan ilegal, tetapi ada dimensi krisis kemanusiaan yang tidak dapat diabaikan pula.